https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom E-ISSN: 3032-1190
Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM) Juli 2026, Vol.04, No. 02, Hal: 255 – 262

Komunikasi Antar Stakeholder dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Waduk Windu dengan Pendekatan Community Based Tourism

[1]Artha Adesti Susilo, [2]Teguh Priyo Sadono, [3]Dinda Lisna Amilia
[1,2,3]Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
arthaadesti13@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini mengkaji komunikasi antar stakeholder dalam mendukung pengelolaan Wisata Waduk Windu, Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan pendekatan Community-Based Tourism (CBT). Sejak dibuka pada tahun 2023 di bawah pengelolaan BUMDes Cinta, wisata ini mengalami penurunan pengunjung yang signifikan, mengindikasikan adanya permasalahan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama: Direktur BUMDes, Kepala Desa Cinandang, dan masyarakat lokal. Analisis menggunakan lima prinsip CBT menurut Suansri (2003) ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Temuan menunjukkan komunikasi antar stakeholder belum sepenuhnya selaras dengan prinsip CBT. Prinsip budaya dan lingkungan relatif lebih baik, ditandai mekanisme musyawarah konsensus dan sistem pelaporan organik. Sementara prinsip ekonomi, sosial, dan politik masih lemah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam informasi keuangan, forum komunikasi rutin, maupun pengambilan keputusan strategis. Penelitian menyimpulkan bahwa modal sosial berupa tradisi musyawarah dan gotong royong dapat menjadi fondasi membangun komunikasi inklusif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Komunikasi stakeholder, Community Based Tourism,

Abstract
This study examines stakeholder communication in supporting the management of Waduk Windu Tourism, Cinandang Village, Dawarblandong District, Mojokerto Regency, using a Community-Based Tourism (CBT) approach. Since opening in 2023 under the management of BUMDes Cinta, the tourism site has experienced a significant decline in visitors, indicating communication and coordination problems among stakeholders. The study uses an exploratory qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from three main informants: the BUMDes Director, the Village Head of Cinandang, and local community members. Analysis employs Suansri's (2003) five CBT principles: economic, social, cultural, environmental, and political. Findings show that stakeholder communication has not fully aligned with CBT principles. The cultural and environmental principles are relatively better, marked by consensus-based deliberation mechanisms and organic reporting systems. Meanwhile, the economic, social, and political principles remain weak as the community is excluded from financial information flows, routine communication forums, and strategic decision-making. The study concludes that social capital in the form of deliberation and mutual cooperation traditions can serve as a foundation for building more inclusive and sustainable communication.
Keyword: *stakeholder communication, Community-Based Tourism, BUMDes, reservoir tourism, community-based tourism*

Pendahuluan

Pengelolaan pariwisata merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kemampuan yang bervariasi. Dalam kerangka pariwisata berbasis desa, terdapat tiga aktor kunci yang terlibat, yaitu pemerintah desa sebagai pengatur kebijakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola operasional, serta warga lokal sebagai pemilik sumber daya dan aktor utama (Hastutik et al., 2021). Keberhasilan pengelolaan wisata sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara ketiga pihak ini, yang mendasar pada kualitas komunikasi yang terjalin. Tanpa adanya komunikasi yang sistematis dan inklusif, koordinasi antar pemangku kepentingan akan terhambat sehingga program yang direncanakan berpotensi tidak berjalan dengan baik (Susilo et al., 2016).

Dalam konteks Pariwisata Berbasis Komunitas (Community-Based Tourism/CBT), komunikasi berfungsi lebih dari sekadar alat koordinasi. Komunikasi berperan sebagai sarana pemberdayaan melalui dialog yang terbuka dan inklusif, di mana masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama yang mengarahkan pengelolaan sektor pariwisata (U. Yasir, 2021). Pendekatan CBT menekankan bahwa manfaat dari pariwisata harus tersebar secara adil di komunitas melalui keterlibatan aktif pada setiap tahap proses, dari perencanaan hingga evaluasi. Menurut Suansri (2003), CBT dijalankan berdasarkan lima prinsip utama: ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Wisata Waduk Windu terletak di Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dan merupakan destinasi waduk pertama di desa tersebut yang resmi dibuka untuk umum pada tahun 2023 di bawah manajemen BUMDes Cinta. Pada awal pembukaannya, wisata ini mampu menarik minat pengunjung yang cukup besar (Redaksi, 2022). Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga kondisi wisata saat ini bisa dikatakan sepi. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi di antara para pemangku kepentingan yang belum terlaksana secara berkelanjutan dan teratur (Rakhmi et al., 2023).

Observasi awal menunjukkan koordinasi antara BUMDes dan pemerintah desa hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti saat event atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setahun sekali. Di internal BUMDes, koordinasi dilakukan secara informal melalui pertemuan tidak terjadwal tanpa agenda atau dokumen terperinci. Sementara interaksi antara BUMDes dan masyarakat berlangsung sepenuhnya secara informal tanpa forum yang terencana, yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi warga. (Rohimah et al., 2018) Kondisi ini memperlihatkan bahwa penelitian tentang komunikasi stakeholder dalam konteks pengelolaan wisata berbasis BUMDes belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam literatur komunikasi pariwisata di Indonesia (Hastutik et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola komunikasi antar stakeholder dalam mendukung pengelolaan Wisata Waduk Windu dengan pendekatan Community-Based Tourism (CBT), sekaligus menyajikan saran konkret bagi pengelola wisata desa lainnya dalam membangun pola komunikasi yang lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan paradigma objektif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data lapangan dalam bentuk narasi, khususnya dalam menjelaskan pola komunikasi, saluran komunikasi, dan tantangan komunikasi di antara para stakeholder (Sugiyono, 2016). Metode eksploratif digunakan karena kajian tentang komunikasi antar stakeholder dalam pengelolaan wisata berbasis BUMDes di waduk merupakan topik yang masih minim literatur (Rohimah et al., 2018).

Subjek penelitian terdiri dari tiga informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Wisata Waduk Windu: (1) Bapak Sukestiawan selaku Direktur BUMDes Cinta, sebagai informan yang paling memahami dinamika komunikasi operasional; (2) Bapak H. Agus Siwahyudi selaku Kepala Desa Cinandang sekaligus Komisaris BUMDes, yang memiliki otoritas dalam kebijakan desa; dan (3) Ibu Sana, warga lokal sekaligus pelaku UMKM di kawasan wisata, yang merepresentasikan perspektif masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi (Creswell, 2014 dalam(Ardiansyah et al., 2023). Analisis data dilakukan menggunakan tiga tahap,reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dari ketiga informan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi dalam CBT menurut Suansri (2003) mencakup penyediaan dana untuk mendukung kemajuan komunitas, penciptaan peluang kerja di industri pariwisata, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Dalam ranah komunikasi, prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan informasi finansial kepada semua pihak agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aliran informasi keuangan di Wisata Waduk Windu berjalan secara terbatas dan eksklusif. Pelaporan keuangan antara BUMDes Cinta dan Pemerintah Desa Cinandang berlangsung melalui saluran resmi berupa Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), tetapi frekuensinya hanya dilakukan setahun sekali. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMDes: "Mekanismenya ada dua, yaitu RAT yang kami gunakan sebagai forum pertanggungjawaban tahunan, dan LPJ yang kami susun secara resmi" (Sukestiawan, 12 Mei 2026).

Yang lebih kritis adalah posisi masyarakat yang sepenuhnya tidak mendapat akses informasi keuangan. Para pelaku UMKM tidak memahami mekanisme pembagian hasil, jumlah pendapatan wisata, maupun pengaturan dana pengembangan komunitas: "Mengenai pembagian hasil pengelolaan wisata secara keseluruhan, saya terus terang kurang memahami mekanismenya" (Sana, 12 Mei 2026). Kondisi ini bertentangan langsung dengan prinsip ekonomi CBT yang mengharuskan distribusi keuntungan secara adil kepada seluruh anggota komunitas (Suansri, 2003). Temuan ini sejalan (Susilo et al., 2016) yang menyatakan bahwa kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat lokal menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang optimal. Jika ditinjau melalui teori komunikasi Schramm dalam (Didik, 2021), kesenjangan "bidang pengalaman" antara

pengelola dan masyarakat inilah yang menyebabkan komunikasi ekonomi tidak berjalan efektif.

Prinsip Sosial

Prinsip sosial CBT menurut Suansri (2003) mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya rasa bangga terhadap komunitas, pembagian peran yang adil, serta mekanisme penguatan organisasi. Dalam konteks komunikasi, prinsip ini menuntut mekanisme penyampaian informasi yang inklusif dan partisipatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi antara BUMDes dan masyarakat masih bersifat satu arah, informal, dan tidak terjadwal, hanya terjadi pada momen tertentu saja. BUMDes mengakui bahwa "belum ada forum komunikasi khusus yang diadakan secara rutin dengan masyarakat" (Sukestiawan, 12 Mei 2026). Kepala Desa juga mengakui hambatan serupa: "Komunikasi yang kami lakukan rasanya masih belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran dan ketertarikan masyarakat untuk terlibat" (H. Agus Siwahyudi, 11 Mei 2026).

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah terbentuknya internalisasi marginalisasi di kalangan masyarakat. Pelaku UMKM menganggap wajar jika tidak diikutsertakan dalam forum rapat karena merasa kurang berpengalaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola komunikasi eksklusif tidak hanya menciptakan hambatan struktural, tetapi juga hambatan psikologis yang lebih sulit diatasi. Temuan ini selaras dengan (U. Yasir, 2021) yang menegaskan bahwa komunikasi aktif yang melibatkan berbagai pihak merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya partisipasi publik yang nyata dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Menurut (Bajari & Kadri, 2022), fungsi komunikasi dalam membentuk sikap dan perilaku partisipasi tidak akan berjalan jika saluran umpan balik dari masyarakat tidak tersedia.

Prinsip Budaya

Prinsip budaya CBT menurut Suansri (2003) mencakup semangat menghormati variasi budaya, pertumbuhan interaksi budaya, serta pengelolaan pariwisata yang berakar pada nilai-nilai dan norma budaya setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam dimensi budaya merupakan elemen yang paling mencerminkan prinsip CBT. Setiap rencana kegiatan yang mencakup unsur budaya lokal selalu dimulai dengan musyawarah yang melibatkan BUMDes, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Prinsip konsensus diterapkan dengan ketat: "Apabila ada pihak yang menyatakan keberatan, maka kami tidak akan memaksakan pelaksanaannya" (Sukestiawan, 12 Mei 2026). Kepala Desa juga mempertegas: "Tidak ada keputusan yang boleh dipaksakan" (H. Agus Siwahyudi, 11 Mei 2026).

Informasi mengenai kegiatan budaya sampai ke warga melalui jaringan RT yang telah berfungsi dengan baik: "Biasanya informasinya disampaikan dalam pertemuan di tingkat desa, setelah itu diteruskan oleh ketua RT kepada warga" (Sana, 12 Mei 2026). Keberhasilan ini tidak berasal dari desain kelembagaan yang sengaja dibuat, melainkan dari kekuatan modal sosial berupa tradisi musyawarah yang sudah lama terinternalisasi dalam masyarakat Desa Cinandang. Temuan ini selaras dengan(Rohimah et al., 2018) yang menyatakan bahwa adanya proses musyawarah yang melibatkan masyarakat merupakan indikator keberhasilan CBT, terutama pada aspek budaya dan kearifan lokal. Menurut(Wibowo et al., 2024), elemen modal

sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial berkontribusi signifikan terhadap kualitas kolaborasi antar stakeholder.

Prinsip Lingkungan

Prinsip lingkungan CBT menurut Suansri (2003) melibatkan pengembangan daya dukung wilayah, penerapan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran konservasi. Temuan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Wisata Waduk Windu saat ini masih terjaga dengan baik. Komunikasi terkait isu lingkungan antara BUMDes dan pemerintah desa berlangsung secara informal melalui percakapan santai: "Kadang kami lakukan di Café Cinta yang berada di area wisata, di mana kami dapat saling menyampaikan perkembangan terkini" (Sukestiawan, 12 Mei 2026). Pemerintah Desa juga telah memiliki jadwal kebersihan rutin dan menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan warga apabila terjadi permasalahan lingkungan.

Masyarakat lokal berperan sebagai pihak yang paling peka terhadap perubahan lingkungan karena kedekatan geografis antara kawasan wisata dan permukiman warga: "Kawasan Waduk Windu ini berada sangat dekat dengan rumah-rumah warga, sehingga apabila ada perubahan kondisi lingkungan, warga biasanya cepat mengetahuinya" (Sana, 12 Mei 2026). Sistem pelaporan organik dari masyarakat kepada Kepala Desa sudah berfungsi, meskipun masih bersifat reaktif. Temuan ini didukung (Wibowo et al., 2024) yang menjelaskan bahwa kedekatan dan kepercayaan antar penduduk berkontribusi signifikan pada kolaborasi dalam pelestarian lingkungan. Meski demikian, diperlukan formalisasi mekanisme pelaporan agar pengelolaan lingkungan dapat bersifat antisipatif, bukan hanya reaktif terhadap masalah yang sudah timbul (U. Yasir, 2021).

Prinsip Politik

Prinsip politik CBT menurut Suansri (2003) meliputi peningkatan partisipasi masyarakat lokal, pemberdayaan komunitas yang lebih luas, serta mekanisme yang menjamin hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Temuan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan strategis terkait Wisata Waduk Windu sepenuhnya terpusat di antara BUMDes dan Pemerintah Desa. Forum pengambilan keputusan hanya dilaksanakan saat ada persoalan mendesak, bukan sebagai mekanisme teratur. Direktur BUMDes mengakui: "Rapat biasanya baru kami selenggarakan apabila ada event tertentu atau ada persoalan mendesak. Jadi sifatnya masih situasional" (Sukestiawan, 12 Mei 2026). Kepala Desa menambahkan bahwa koordinasi kerap dilakukan secara informal di malam hari tanpa melibatkan masyarakat.

Masyarakat sama sekali tidak memiliki akses ke proses deliberasi "Mengenai proses musyawarah dalam pengelolaan wisata, saya terus terang belum pernah terlibat secara langsung" (Sana, 12 Mei 2026). Ironinya, masyarakat sangat bersedia terlibat secara fisik melalui gotong royong, tetapi tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Pola ini menggambarkan bentuk partisipasi simbolis yang bertentangan dengan semangat CBT yang memprioritaskan komunitas sebagai aktor utama. Temuan ini dikuatkan oleh(Azka Dwi Putra et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis BUMDes sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. (Romadhan & Pradana, 2023) juga menegaskan bahwa komunikasi pariwisata yang efektif

memerlukan pembagian peran komunikator yang seimbang di mana masyarakat lokal berperan sebagai komunikator aktif, bukan sekadar komunikan pasif.

Pola Komunikasi Antar Stakeholder Analisis Integratif

Secara keseluruhan, analisis terhadap kelima prinsip CBT menunjukkan bahwa pola komunikasi antar stakeholder di Wisata Waduk Windu belum berlangsung secara proporsional dan setara. Masyarakat lokal yang secara normatif seharusnya menempati posisi sebagai subjek utama dalam pendekatan CBT justru berada pada posisi paling marginal dalam keseluruhan proses komunikasi. Di antara kelima prinsip yang dianalisis, hanya prinsip budaya yang menunjukkan pola komunikasi inklusif, dan hal tersebut lebih banyak didorong oleh kekuatan nilai-nilai tradisi lokal berupa budaya musyawarah daripada oleh mekanisme komunikasi yang secara sadar dirancang oleh pengelola.

Jika merujuk pada model komunikasi Penta Helix yang dikemukakan oleh (Y. Yasir et al., 2021), kesuksesan pengembangan pariwisata berbasis komunitas mengharuskan keterlibatan setiap aktor dalam kerjasama yang setara dalam satu jaringan komunikasi yang koheren. Realitas di lapangan menunjukkan BUMDes dan pemerintah desa hampir sepenuhnya menguasai aliran komunikasi strategis, sedangkan masyarakat masih diposisikan hanya sebagai penerima informasi. (Pratiwi, 2025) juga menggarisbawahi bahwa BUMDes dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur agar prinsip-prinsip CBT tidak hanya menjadi klaim normatif tetapi benar-benar terimplementasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa modal sosial yang kuat berupa tradisi musyawarah dan gotong royong masyarakat Desa Cinandang merupakan aset yang sangat berharga (Wibowo et al., 2024) dan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan komunikasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan Wisata Waduk Windu ke depannya.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap pola komunikasi antar stakeholder di Wisata Waduk Windu melalui lima prinsip Community-Based Tourism menurut Suansri (2003), dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di antara BUMDes Cinta, Pemerintah Desa Cinandang, dan masyarakat lokal belum sepenuhnya selaras dengan kelima prinsip CBT. Tiga prinsip yang menunjukkan kondisi komunikasi belum optimal adalah prinsip ekonomi (informasi keuangan hanya mengalir secara vertikal antara BUMDes dan pemerintah desa), prinsip sosial (tidak ada forum komunikasi yang teratur dan inklusif dengan masyarakat), dan prinsip politik (masyarakat tidak dilibatkan dalam proses deliberasi pengambilan keputusan). Dua prinsip yang relatif lebih baik adalah prinsip budaya, di mana mekanisme musyawarah konsensus sudah berjalan konsisten melalui kekuatan modal sosial lokal, serta prinsip lingkungan, di mana sistem pelaporan organik dari masyarakat kepada kepala desa sudah terbentuk secara alami.

Sebagai rekomendasi, BUMDes Cinta disarankan membentuk forum komunikasi rutin yang melibatkan masyarakat lokal minimal tiga bulan sekali dengan agenda yang terstruktur dan terdokumentasi. Mekanisme musyawarah yang berjalan baik pada aspek budaya hendaknya direplikasi ke aspek ekonomi dan pengambilan keputusan strategis. Pemerintah Desa Cinandang perlu mengoptimalkan perannya sebagai jembatan komunikasi antara

BUMDes dan masyarakat, serta memformalkan sistem pelaporan lingkungan yang selama ini sudah berjalan secara organik. Dengan demikian, modal sosial berupa tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat dapat menjadi fondasi untuk membangun komunikasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan Wisata Waduk Windu.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9.

Azka Dwi Putra, Hauralya Salsabilla, I Putu Nayaka Reswara, Sulthon Razak, & Dian Fitriani Afifah. (2025). Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(3), 245–258. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5829

Bajari, A., & Kadri. (2022). Komunikasi Manusia: Sejarahm Konsep dan Praktik.

Didik, H. (2021). Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis : Didik Hariyanto Diterbitkan oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All rights reserved. In Pengantar Ilmu Komunikasi.

Hastutik, D., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension, 45(1), 46. https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539

Pratiwi, E. nanda. (2025). KOMUNIKASI STRATEGIS BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) OLEH BUMDES DALAM PENGEMBANGAN BRANDING DESA WISATA. 05(04), 173–183.

Rakhmi, A., Hamdani, T., Octavanny, V., & Aruman, A. E. (2023). Komunikasi Pokdarwis dalam Pengimplementasian Program Pengembangan Pariwisata pada Masyarakat Cirendeu Cimahi Jawa Barat Pokdarwis Communications In Program Implementation Of Tourism Development In The Cirendeu Community Cimahi West Java. Komunikasi Pembangunan, 21(02), 93–107.

Redaksi, I. hairon. (2022). wow! Waduk windu cinandang sudah ramai pengunjung meski belum opening. SUARA INDONESIA. https://suaraindonesia.co.id/news/wisata/631c2686edd0a/Wow-Waduk-Windu-Cinandang-Sudah-Ramai-Pengunjung-Meski-Belum-Opening

Rohimah, A., Hariyoko, Y., & Ayodya, B. P. (2018). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Melalui Pendekatan Community Based. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 4(4), 363–368.

Romadhan, M. I., & Pradana, B. C. S. A. (2023). Komunikasi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Segunung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, 12(2), 222–234. https://doi.org/10.35508/jikom.v12i2.8696

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In Bandung:Alfabeta.

Susilo, M. E., -, P., & Erawati, H. (2016). Pendekatan Stakeholders Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Ilmu Komunikasi, 14(2), 122. https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2126

Wibowo, A., Lestari, E., & Sugihardjo. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Penyuluhan, 20(01), 149–164. https://doi.org/10.25015/20202446684

Yasir, U. (2021). 26170-117777-1-Pb. 9(1), 108–120.

Yasir, Y., Firzal, Y., Sulistyani, A., & Yesicha, C. (2021). Penta helix communication model through community based tourism (CBT) for tourism village development in Koto Sentajo, Riau, Indonesia. Geojournal of Tourism and Geosites , 37(3), 851–860. https://doi.org/10.30892/GTG.37316-718